KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4410-0542-7100-2304

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099671/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(20)	SULAWESI TENGGARA
4. Kode/Nama Satker	:	(099671)	PENGADILAN NEGERI RAHA
Sebesar	:	Rp. 173.660.000	(SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	173.660.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	173.660.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	173.660.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN R A H A	(157)	Rp.	173.660.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	173.660.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	173.660.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
		4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
		5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
		6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
		8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
		10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
		11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
		15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
		16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
		17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
		18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
		19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
		20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

21. 14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

22. 15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi		2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		2.00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		220,00	Perkara, Berkas Perkara	120.800.000
Rincian Output		:	01 BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah		220.00	Perkara	120.800.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		100,00	Orang	36.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	(PN)	100.00	Orang	36.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		4,00	Perkara, Berkas Perkara	15.360.000
Rincian Output		:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	(PN)	1.00	Perkara	360.000
			02 QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	(PN)	3.00	Perkara	15.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026

DS:4410-0542-7100-2304

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	173.660.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	173.660.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099671	**PENGADILAN NEGERI RAHA**	**-**	**173.660**	**-**	**-**	**-**	**173.660**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**173.660**	**-**	**-**	**-**	**173.660**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**173.660**	**-**	**-**	**-**	**173.660**		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500	20 . 03	
	(20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	157	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	120.800	-	-	-	120.800	20 . 03	
	(20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)								
01	RM	-	120.800	-	-	-	120.800	157	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	36.000	-	-	-	36.000	20 . 03	
	(20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)								
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	157	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	15.360	-	-	-	15.360	20 . 03	
	(20.03 SULAWESI TENGGARA / KAB. MUNA)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026

DS:4410-0542-7100-2304

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	15.360	-	-	-	15.360	157	
	JUMLAH	**-**	**173.660**	**-**	**-**	**-**	**173.660**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode/Nama Satker : (099671) PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099671**	**PENGADILAN NEGERI RAHA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.501	173.660
		BELANJA BARANG	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.501	173.660
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.501	173.660
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.469	14.501	173.660
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.249	14.647
		- PNBP (425231)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	30
		- PNBP (425232)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500
		- PNBP (425233)	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	163	1.890
		- PNBP (425239)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.029	12.227

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
IV A. B L O K I R

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [099671] PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099671/2026
IV B. C A T A T A N

DS:4410-0542-7100-2304

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [099671] PENGADILAN NEGERI RAHA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002